

**HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PENERIMAAN PAJAK DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA TAHUN 1980 -2012**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

SRI RETNOWATI

B300100054

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi yang berjudul:
**HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PENERIMAAN PAJAK DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA TAHUN 1980-2012**

Yang ditulis oleh:

SRI RETNOWATI

B300100054

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut layak untuk diterima.

Surakarta, 14 Juni 2014

Pembimbing

(Didit Purnomo.SE.MSi)



Mengesah, Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Triyono, M.Si.)

HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PENERIMAAN PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA TAHUN 1980-2012

Sri Retnowati

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl A Yani Tromol Pos I, Pabelan Kartasura Surakarta 57102

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Tahun 1980 – 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Indonesia Tahun 1980-2012. Penelitian ini menggunakan metode Granger Causality Test untuk meneliti pola atau arah hubungan kausalitas antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah di Indonesia tahun 1970-2004. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak dalam negeri dan pengeluaran pemerintah pusat. Hasil penelitian menggunakan uji kausalitas granger menunjukkan bahwa hipotesis nol untuk TX (penerimaan pajak dalam negeri) mempengaruhi G (pengeluaran pemerintah pusat) ditolak, dengan ditunjukkan pada probabilitas $(0,0135) < \alpha (0,05)$ pada Lag 3, yang berarti ada pola kausalitas antara penerimaan pajak dengan pengeluaran. Hasil kedua hipotesis nol untuk G (pengeluaran pemerintah mempengaruhi TX (penerimaan pajak dalam negeri) juga di tolak, hal ini di tunjukkan pada probabilitas $(0,0102) < \alpha (0,05)$ pada lag 3, yang berarti ada pola kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pola hubungan kausalitas dua arah antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Indonesia.

Kata kunci: Granger Causality Test, Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah.

I. Pendahuluan

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Disamping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya Undang-undang perpajakan baru, yang terdiri atas: UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai (Mardiasmo; 2013).

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang

pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya (Mardiasmo; 2013).

Pajak adalah pungutan yang ditarik dari masyarakat yang tidak menimbulkan kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar pajak (Prawoto, 2011). Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari perbelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan - kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah (Sukirno; 2010).

Pengeluaran Pemerintah adalah pengeluaran (perbelanjaan) pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa (Sukirno; 2010). Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Di Indonesia pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah. Penerimaan

pajak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah dan sebaliknya pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini dilakukan Untuk menganalisis Pola hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Indonesia Tahun 1980-2012.

II. Landasan Teori

A. Penerimaan Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan yang ditarik dari masyarakat yang tidak menimbulkan kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar pajak. Menurut sifatnya pajak adalah wajib (Prawoto; 2011).

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public investment* (Negara dkk; 2006).

Menurut Djajadiningrat pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum (Negara dkk; 2006).

2. Unsur –Unsur Pajak

a) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

b) Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau

- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak memberikan penjelasan mengenai mengenai hak negara untuk memungut pajak. Teori- teori tersebut antara lain:

(a) Teori asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang, karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi

(b) Teori kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing masing warga negara, termasuk kepentingan dalam dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

(c) Teori Daya Pikul

Beban pajak yang harus dibayar harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan:

- 1) Unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

(d) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

(e) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

B. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukannya yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran (perbelanjaan) pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa (Sukirno; 2010). Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah belanja pemerintah terhadap barang dan jasa.

C. Hubungan Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah

Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah pajak yang diramalkan. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan (Sukirno, 2010). Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat atau berasal dari pemerintah (Waluyo, 2007). Menurut Mankiw (2006) Pemerintah bisa mendanai pengeluarannya dalam 3 cara, yaitu pemerintah bisa meningkatkan penerimaan lewat pajak seperti pajak penghasilan, perorangan dan pajak pendapatan perusahaan, pemerintah bisa dengan mudah mencetak uang. Menurut Narayan (2005) pengeluaran pemerintah meningkatkan penerimaan pemerintah.

III. Metode Penelitian

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan jenis data runtun waktu (*time series*) untuk kurun waktu 1980-2012. Data yang digunakan meliputi data penerimaan pajak dalam negeri dan pengeluaran pemerintah pusat. Data-data tersebut diperoleh dari Nota Keuangan Pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), instansi yang terkait dan dari sumber-sumber lainnya yang relevan.

B. Definisi operasional

Pajak adalah pungutan yang ditarik dari masyarakat yang tidak menimbulkan kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar pajak. Menurut sifatnya pajak adalah wajib (Prawoto, 2011). Dalam penelitian ini, data yang dipakai mengacu pada pajak dalam negeri yang memiliki kemudahan dalam mengakses melalui berbagai media. Satuan yang digunakan adalah Miliyar rupiah.

Pengeluaran Pemerintah adalah pengeluaran (perbelanjaan) pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi, dan ke atas jasa-jasa (Sukirno, 2010). Dalam penelitian ini, data yang dipakai mengacu pada pengeluaran pemerintah pusat yang memiliki kemudahan dalam mengakses melalui berbagai media. Satuan yang digunakan adalah Miliyar rupiah.

C. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji Kausalitas Granger. Langkah- langkah pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji stasioneritas

Suatu data urut waktu dikatakan stasioner apabila rata-rata, varian dan otokovarian ada berbagai waktu kelambanan (*lag*) bernilai konstan pada titik waktu yang manapun pengukuran dilakukan (Utomo, 2012).

Metode pengujian stasioneritas yang dipakai pada penelitian ini adalah uji ADF (Augmented Dickey Fuller) dengan waktu kelambanan maksimum (k) sebesar $N^{1/3}$. Model pengujiannya adalah sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = \delta Y_{t-1} + \alpha \sum_{i=1}^k \Delta Y_{t-i} + U_t$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \delta Y_{t-1} + \alpha \sum_{i=1}^k \Delta Y_{t-i} + U_t$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-1} + \alpha \sum_{i=1}^k \Delta Y_{t-i} + U_t$$

Hipotesis uji ADF adalah $H_0 : \delta = 0$ (data tidak stasioner) dengan $H_A : \delta < 0$ (data stasioner). Apabila koefisien $\delta > 0$ (positif), maka uji ADF tidak valid dikarenakan data urut waktu yang diuji bersifat eksplosif (Gujarati, 2003). Model uji ADF terbaik adalah model yang memiliki nilai Akaike information criterion (aic) minimum.

2. Uji Otokorelasi

Otokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh terhadap nilai variabel masa kini, atau masa datang.

3. Uji Kausalitas Granger

Formulasi model uji kausalitas Granger yakni:

$$Tx_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i Tx_{t-i} + \sum_{j=1}^m \beta_j G_{t-j} + U_t$$

$$G_t = \sum_{i=1}^m \lambda_i G_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j Tx_{t-j} + U_t$$

Dimana :

Tx : penerimaan pajak dalam negeri

G : pengeluaran pemerintah pusat

n,m : jumlah lag

Ut : error

IV. Hasil Penelitian

Pada analisis kausalitas granger syarat yang harus dipenuhi selain data harus time series yaitu data harus stasioner dan tidak ada masalah otokorelasi. Adapun hasil uji stasioneritas dan otokorelasi sebagai berikut.

1. Uji Stasioneritas

Hasil uji stasioneritas untuk variabel TX (Penerimaan Pajak Dalam Negeri) ada tiga macam model uji ADF. Ketiga model tersebut memiliki koefisien $\delta < 0$ (negatif). Dari ketiga model uji ADF yang memiliki *Akaike Info Criterion* (AIC) minimum terlihat pada model ke-3 yaitu dengan nilai AIC sebesar 22.99782. Pada model dengan AIC minimum ini, koefisien δ (-3.710170) < 0 , dilanjutkan dengan nilai absolut τ statistik (-6.917493) $>$ nilai absolut τ (0,05), berarti menunjukkan bahwa variabel TX (Penerimaan Pajak Dalam Negeri) Stasioner.

Hasil uji stasioneritas variabel G (Pengeluaran Pemerintah Pusat) ada tiga macam model uji ADF. Dari ketiga model yang memiliki *Akaike Info Criterion* (AIC) minimum, terlihat pada model ke-1 yaitu dengan nilai AIC sebesar 23,91807, hal ini menunjukkan bahwa variabel G (Pengeluaran Pemerintah Pusat) stasioner. Dilihat dari koefisien δ (-1,360600) < 0 , nilai absolut statistik τ (-7,5030514) $>$ nilai absolut τ (0,05). Dengan demikian variabel TX (Penerimaan Pajak Dalam Negeri) akan menjadi pasangan variabel G (Pengeluaran Pemerintah Pusat) dalam analisis uji kausalitas granger.

2. Otokorelasi

Hasil uji otokorelasi pengeluaran pemerintah terhadap pajak dapat dilihat bahwa nilai Probabilitas Chi-Square sebesar 0,3176 $> \alpha$ (0,05), jadi H_0 diterima, tidak terdapat masalah otokorelasi dalam model. Hasil dari regresi uji otokorelasi pajak terhadap pengeluaran pemerintah pusat dalam negeri dapat dilihat bahwa nilai Probabilitas Chi-Square sebesar 0,0522 $> \alpha$ (0,05), jadi H_0 diterima, tidak terdapat masalah otokorelasi dalam model.

3. Uji Kausalitas Granger Pajak Dalam Negeri (TX) dan Pengeluaran Pemerintah Pusat(G)

Pada penelitian ini uji kausalitas granger dilakukan pada lag 3 dengan menggunakan α sebesar 0,05. Dalam penelitian ini dilakukan uji TX \rightarrow G dan uji G \rightarrow TX.

- a. Uji Kausalitas Granger Pengeluaran Pemerintah Pusat Terhadap Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Pengujian kausalitas granger pengeluaran pemerintah pusat terhadap penerimaan pajak dalam negeri secara manual ada 5 tahap.

Tahap 1: Uji Kausalitas Granger $TX \rightarrow G$.

Uji kausalitas granger $TX \rightarrow G$ tahap 1 dapat diketahui nilai $RSS_{TX} = 2.80E+10$.

Tahap 2 : Uji Kausalitas Granger $TX \rightarrow G$.

Hasil uji kausalitas granger $TX \rightarrow G$ tahap 2 dapat diketahui nilai $RSS_{UTX} = 1.78E+10$.

Tahap 3: Formulasi Hipotesis

$H_o: \sum \beta_j = 0$, TX (pajak dalam negeri) tidak mempengaruhi atau tidak menyebabkan G (pengeluaran pemerintah pusat).

$H_a: \sum \beta_j \neq 0$, TX (pajak dalam negeri) mempengaruhi atau menyebabkan G (pengeluaran pemerintah pusat).

Tahap 4 : Menghitung Nilai F

$$F = \frac{(RSS_{tx} - RSS_{UTx}) / m}{RSS_{UTx} / (n - k)}$$

$$F = \frac{(2.80E + 10 - 1.78E + 10) / 3}{1.78E + 10 / (30 - 7)}$$

$$F = \frac{0,34}{0,077391304}$$

$$F = 4,393258447$$

Tahap 5: Kesimpulan

Berdasar tabel F-hitung $\leq F(\alpha, m, n-k)$ atau $F(0,05; 3; 23) = 3,03$; jadi $4,393258447 > 3,03$, dengan demikian H_o ditolak. Kesimpulan: TX (pajak dalam negeri) mempengaruhi atau menyebabkan G (pengeluaran pemerintah pusat).

- b. Uji Kausalitas Granger Penerimaan Pajak Dalam Negeri Terhadap Pengeluaran Pemerintah Pusat.

Pengujian kausalitas granger penerimaan pajak dalam negeri terhadap pengeluaran pemerintah pusat secara manual ada 5 tahap.

Tahap 1: Uji Kausalitas Granger $G \rightarrow TX$

Hasil uji kausalitas granger $G \rightarrow TX$ Tahap 1 dapat diketahui nilai $RSS_G = 2.09E+10$.

Tahap 2 : Uji Kausalitas Granger $G \rightarrow TX$.

Hasil uji kausalitas granger $G \rightarrow TX$ dapat diketahui nilai $RSS_{UG} = 1.29E+10$.

Tahap 3: Formulasi Hipotesis

$H_o: \sum \beta_j = 0$, G (pengeluaran pemerintah pusat) tidak mempengaruhi atau tidak menyebabkan TX (pajak dalam negeri).

$H_a: \sum \beta_j \neq 0$, G (pengeluaran pemerintah pusat) mempengaruhi atau menyebabkan TX (pajak dalam negeri)

Tahap 4 : Menghitung Nilai F

$$F = \frac{(RSS_G - RSS_{UG}) / m}{RSS_{UG} / (n - k)}$$

$$F = \frac{(2.09E + 10 - 1.29E + 10) / 3}{1.29E + 10 / (30 - 7)}$$

$$F = \frac{0,2666666666}{0,056086956}$$

$$F = 4,754521996$$

Tahap 5: kesimpulan

Berdasar tabel F-hitung $\leq F(\alpha, m, n-k)$ atau $F(0,05; 3; 23) = 3,03$; jadi $4,754521996 > 3,03$, dengan demikian H_o ditolak. Kesimpulan: G (pengeluaran pemerintah pusat) mempengaruhi atau menyebabkan TX (pajak dalam negeri).

Hasil uji kausalitas granger pada variabel TX (pajak dalam negeri) dan G (pengeluaran pemerintah pusat) secara ringkas menunjukkan bahwa

hipotesis nol untuk TX (penerimaan pajak dalam negeri) mempengaruhi G (pengeluaran pemerintah pusat) ditolak, ditunjukkan pada probabilitas $(0,0135) < \alpha (0,05)$ pada Lag 3, yang berarti ada pola kausalitas antara penerimaan pajak dalam negeri dengan pengeluaran pemerintah pusat. Hasil kedua hipotesis nol untuk G (pengeluaran pemerintah pusat) mempengaruhi TX (penerimaan pajak dalam negeri) juga di tolak, hal ini di tunjukkan pada probabilitas $(0,0102) < \alpha (0,05)$ pada lag 3, yang berarti ada pola kausalitas antara pengeluaran pemerintah pusat dengan penerimaan pajak dalam negeri.

V. Kesimpulan

1. Hasil uji stasioneritas dengan menggunakan uji ADF terhadap variabel TX (penerimaan pajak dalam negeri) menunjukkan bahwa variabel TX (penerimaan pajak dalam negeri) adalah stasioner.
2. Hasil uji stasioneritas dengan menggunakan uji ADF terhadap variabel G (pengeluaran pemerintah pusat) menunjukkan bahwa variabel G (pengeluaran pusat) adalah stasioner.
3. Hasil uji kausalitas granger menunjukan bahwa adanya hubungan kausalitas dua arah antara TX (penerimaan pajak dalam negeri) dengan G (pengeluaran pemerintah pusat) di Indonesia.

VI. Saran

1. Bagi pemerintah untuk meningkatkan pajak dalam negeri harus memperhatikan pengeluaran pemerintah pusat dan sebaliknya untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah pusat harus memperhatikan pajak dalam negeri karena keduanya mempunyai hubungan dua arah.
2. Penelitian selanjutnya yang ingin meneliti penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah perlu menggunakan metode yang berbeda dalam menganalisis agar terjadi kesimpulan yang berbeda sehingga bisa menambah atau mengevaluasi teori-teori yang ada hasilnya dapat dibandingkan serta kekurangan-kekurangan lainnya dapat diperbaiki. Penggunaan jumlah observasi yang lebih banyak dapat dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih mendekati kenyataan.

VII. Daftar Pustaka

- Badrus, Siti, Zakiyah. 2008. *Analisis Kausalitas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Tebing Tinggi dengan Metode Granger Causality*. Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Medan.
- Ginting, Ripka, Serildahnaita, dkk. 2010. Analisis Kausalitas Antara Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Mepa Ekonomi*.
- Indrawati, Sarastika dan Soebagiyo, Daryono. 2006. Analisis Uji Kausalitas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta dengan Menggunakan Metode Granger Tahun 1978-2003. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 2*.
- Manik, Rikwan, E, S dan Hidayat, Paidi. 2010. Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara (Metode Cointegration Test dan Granger Causality test) . *Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol.2, No.1*.
- Mardiasmo.2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Negara, Tunggul, Anshari, Setia dan Hum, M. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Bayumedia Publising anggota IKAPI Jatim.
- Pudyatmoko, Sri , Y. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Prawoto, Agus. 2011. *Pengantar Keuangan Publik* . BPFE, Yogyakarta.
- Pratama, Dedy, Indra. 2013. *Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Universitas Sriwijaya.
- Ringoringo, Yuki, Samuel, B dan Heryanto, Ganna, Arya. 2006. Kausalitas Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak Indonesia 1970 – 2002. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 21, No 2*.
- Romaulina, S, dkk. 2008. *Analisis Kausalitas Antara Penerimaan Pajak dengan Pengeluaran Pemerintah di Kota Bengkulu Periode 1993 – 2007*. Thesis Fakultas Ekonomi UNIB.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomika Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Solehati. 2011. *Hubungan Kausalitas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Propinsi Yogyakarta Tahun 1985 – 2010*. UMS.

- Utomo, Yuni , Prihadi. 2012. *Buku Praktek Komputer Statistik II Eviews*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Ma*. Alfabeta, Bandung.
- Widarjono, Agus. 2002. Kausalitas Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah: Pendekatan Kointegrasi dan ECM. *Jurnal Vol. 11, No. 1*.
- Wahyuningtyas, Agustina, Endah. 2010. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Defisit Anggaran Terhadap Investasi di Indonesia Tahun 1986-2008. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.